



Volume 14, Number 1, June 2016

P-ISSN: 1829-7382

E-ISSN : 2502-7719

JURNAL HUKUM ISLAM



Jurnal Hukum Islam (Journal of Islamic Law) – JHI, is a periodically scientific journal published by the Syariah and Islamic Economic Department, Islamic State College of Pekalongan Central Java Indonesia. The journal focuses its scope on the issues of Islamic law. We invite scientist, scholars, researches, as well as professionals in the field of Islamic law to publish their researches in our journal. This journal is published every June and December annually.

No part of this publication may be reproduced in any form without prior written permission from Jurnal Hukum Islam (JHI), to whom all request to reproduce copyright material should be derected. Jurnal Hukum Islam (JHI) grants authorisation for individuals to photocopy copyright material for private research use. This authorisation does not extend to any other kind of copying by any means, any form, and for any purpose other than private research use.

OPEN ACCES JOURNAL INFORMATION

Jurnal Hukum Islam (JHI) (*Journal of Islamic Law*) is committed to principle of knowledge for all. The journal provides full acces content at e-journal.stain-pekalongan.ac.id/index.php/jhi

Mailing Address:

Jurnal Hukum Islam (JHI)
Syariah and Islamic Economic Department
Islamic State College of Pekalongan
Kusuma Bangsa Street Number 9 Pekalongan Regency, Telp. (0285) 412575, Fax.
(0285) 423418 Pekalongan Central Java Indonesia
Email (correspondence) : online.jhi@gmail.com
Website: e-journal.stain-pekalongan.ac.id/index.php/jhi

EDITOR IN CHIEF

Mohammad Hasan Bisyri

EDITORIAL BOARD

Ahmad Tubagus Surur, AM Hafidz Ms, Kuat Ismanto, Agus Fakhрина, Isriani Hardini, Zawawi, Susminingsih

ADVISORY EDITORIAL BOARD

Dr. Rosihan R., SH., M.Hum., Universitas Sultan Agung Semarang, Indonesia
Dr. Ita Musyarofah, MA., UIN Sunan Ampel Surabaya, Indonesia
Prof. Abdullah Kelip, SH., Universitas Diponegoro, Semarang Central Java, Indonesia
Dr. Asyari Hasan, M.Ag., IAIN Batusangkar Sumatera Barat, Indonesia
Dr. Shinta Dewi Rismawati, SH., MH., IAIN Pekalongan, Indonesia
Dr. Triana Sofiani, SH., MH., IAIN Pekalongan Jawa Tengah Indonesia, Indonesia
Dr. Ali Trigiyatno, M.Ag., IAIN Pekalongan, Central Java, Indonesia
Dr. Akhmad Jalaludin, MA., IAIN Pekalongan Jawa Tengah Indonesia, Indonesia
Dr. Ade Dedi Rohayana, M.Ag., IAIN Pekalongan, Indonesia

Staff

Mujiburrahman, Nafilah

Daftar Isi

Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji di Indonesia

Mochammad Arif Budiman dan Dimas Bagus Wiranata Kusuma 1-15

Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keputusan Pembelian Produk Asuransi Syariah di Pekalongan

Kuat Ismanto 17-29

Korelasi Interaksi Sosial dalam Perkembangan Hukum Islam di Indonesia

Abdul Wasik 31-48

Peluang, Tantangan dan Strategi Zakat Dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat

Siti Zumrotun 49-63

Pernikahan Di Bawah Umur Perspektif *Maqashid* Al-Qur'an

Kurdi 65-92

Nilai-nilai Sistem Perekonomian Islam dalam Ritual "*Mappadendang*"

Abdul Rahim 93-110

Perceraian Dini: Studi Terhadap Putusan Pengadilan Agama Pekalongan

Achmad Tubagus Surur dan Hanik Rosyidah 111-133

Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji di Indonesia

Mochammad Arif Budiman

Politeknik Negeri Banjarmasin

mab.iium@gmail.com

Dimas Bagus Wiranata Kusuma

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Abstract

The cost for pilgrimage (BPIH) has always changed over the years following the economic circumstances. This research attempts to analyze two external factors, i.e. oil price and exchange rate which are predicted to influence the BPIH in Indonesia. Using vector autoregressive (VAR), it is found that oil price has related with BPIH while exchange rate, relying on annual exchange rate data, has no relation with BPIH. Further, based on variance decomposition function, the contribution of oil price and exchange rate to BPIH is around 9.8% and 6.93% respectively. This finding suggests that both factors do not give major influences on the rate of BPIH in Indonesia.

Keywords: *pilgrimage; pilgrimage cost; oil price; exchange rate*

Abstrak

Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) senantiasa mengalami penyesuaian dari waktu ke waktu seiring dengan perubahan kondisi perekonomian. Penelitian ini berusaha menganalisis faktor-faktor eksternal, yaitu pergerakan harga minyak dunia (oil price) dan kurs nilai tukar (exchange rate) yang diprediksi mempengaruhi penetapan BPIH di Indonesia. Dengan menggunakan pendekatan vector autoregressive (VAR), penulis menemukan bahwa harga minyak (OP) memiliki hubungan dengan penetapan BPIH, sedangkan kurs nilai tukar (ER), berdasarkan data rata-rata tahunan, tidak

menunjukkan keterkaitan terhadap penetapan BPIH. Berdasarkan *variance decomposition function*, tingkat kontribusi OP dan ER terhadap BPIH masing-masing adalah sebesar 9,8% dan 6,93%. Hasil di atas mengindikasikan bahwa kedua faktor tersebut tidak memberikan pengaruh yang dominan terhadap penentuan BPIH di Indonesia.

Kata kunci: haji; BPIH; harga minyak; nilai tukar

1. Pendahuluan

Ditinjau dari berbagai perspektif, ibadah haji memiliki nilai yang tinggi dan menempati kedudukan yang istimewa di dalam sistem ajaran Islam. Dari perspektif religiusitas, haji adalah rukun Islam kelima yang wajib dilaksanakan oleh setiap muslim yang telah mampu dan memenuhi syarat. Ibadah haji menyuguhkan pengalaman rohani yang sangat dalam dan tak terlupakan bagi pelakunya. Berdasarkan hadits Rasulullah, surga merupakan balasan (reward) bagi setiap haji yang mabrur (haji yang diterima). Oleh karena itu, tidak mengherankan apabila setiap orang yang telah menunaikan ibadah haji senantiasa memendam kerinduan untuk dapat kembali ke Tanah Suci sehingga menyebabkan daftar tunggu calon jamaah haji semakin panjang dari tahun ke tahun.

Dalam perspektif sosiologis, haji mempertemukan umat Islam dari seluruh penjuru dunia dalam satu even akbar tahunan di kota Mekkah dan daerah-daerah sekitarnya. Lebih dari tiga juta muslim berkumpul dengan mengenakan pakaian yang sama, mengumandangkan pujian kebesaran untuk Sang Penguasa Semesta. Di samping itu, haji juga dipersepsikan oleh banyak kalangan sebagai sarana yang dapat meningkatkan status sosial seseorang. Orang yang telah menunaikan ibadah haji umumnya mendapatkan status dan posisi terhormat di tengah-tengah masyarakatnya. Sementara itu, penyelenggaraan haji yang melibatkan jutaan orang di satu titik pada saat yang bersamaan tentunya menjadi rangkaian aktivitas yang amat spektakuler ditinjau dari perspektif ekonomi (Miller, 2006). Beragam sektor usaha mulai dari transportasi, perhotelan, perdagangan, restoran, tekstil, komunikasi, hingga beraneka jasa mengalami lonjakan permintaan yang sangat fantastis selama musim haji.

Penelitian ini berusaha mengkaji hubungan di antara haji dan ekonomi

dengan penekanan pada faktor-faktor yang mempengaruhi besarnya biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH) yang ditetapkan pemerintah Republik Indonesia. Secara khusus, penelitian ini berusaha menjelaskan hubungan antara BPH dengan dua faktor eksternal, yaitu pergerakan harga minyak dunia (*oil price*) dan kurs nilai tukar (*exchange rate*).

2. Landasan Teori

2.1 Haji dan Ekonomi

Islam menjustifikasi hubungan organik di antara aktivitas haji dan ekonomi. Secara tegas Allah menyatakan bahwa berdagang dalam ibadah haji tidak dilarang. Allah berfirman, "*Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezeki hasil perniagaan) dari Tuhanmu*" (QS. al-Baqarah: 198; al-Jumu'ah: 9-11). Dalam terminologi bangsa Arab dikenal ungkapan "*hadjdj wa hadjah*" (haji dan bisnis) sebagai satu paket tujuan dalam perjalanan ke Mekkah. Kombinasi tujuan haji dan perdagangan ini begitu kental sehingga para jamaah haji umumnya didoakan dengan ungkapan, "*Semoga Allah menerima hajimu, mengampuni dosamu, dan memberkahi perniagaanmu*" (Pearson, 1996).

Pelaksanaan ibadah haji sepanjang sejarah telah menarik perhatian para peneliti, termasuk dari kalangan Orientalis. Tulisan-tulisan tentang haji pada awalnya lebih banyak berisi catatan perjalanan ataupun rekaman pengalaman pribadi. Tulisan dari sudut pandang ekonomi masih sangat jarang ditemukan. Pada perkembangan berikutnya mulai muncul tulisan yang memandang haji sebagai sebuah aktivitas *tourisme* dan mengkaji pengaruh ekonominya (Din, 1982).

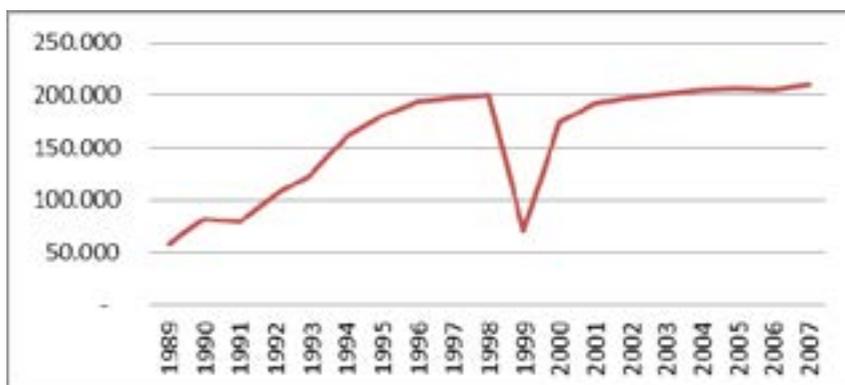
Abdurrahman (2000) memotret praktik haji plus yang menjadi salah satu ekspresi keberagaman kalangan kelas menengah atas di Indonesia pada masa Orde Baru. Sementara itu, Miller (2006) menguraikan perkembangan bisnis transportasi haji sejak zaman kolonial, yang umumnya dikuasai oleh perusahaan-perusahaan milik Barat, hingga era modern, tepatnya paskakemerdekaan, dimana pengelolaan haji sudah ditangani oleh masing-masing negeri muslim. Sebelum tahun 1970an, biaya pelaksanaan haji relatif murah dan stabil karena menggunakan transportasi laut sehingga memakan waktu yang lama. Seiring dengan berkembangnya transportasi udara, waktu yang diperlukan untuk

pelaksanaan haji menjadi semakin singkat, namun ini berefek pada peningkatan biaya haji (Din, 1982).

2.2 Penyelenggaraan Haji di Indonesia

Penyelenggaraan ibadah haji di Indonesia mengalami perkembangan dari masa ke masa. Pada masa kolonial, penyelenggaraan haji dilaksanakan oleh perusahaan swasta tanpa keterlibatan pemerintah. Tiga perusahaan swasta terbesar saat itu adalah Kongsi Tiga, Herklots, dan Alsegoff & Co.. Setelah kemerdekaan, berdiri Yayasan Perjalanan Haji Indonesia (PHI) pada tahun 1950 yang mengelola penyelenggaraan haji di bawah pimpinan tokoh-tokoh umat Islam. Yayasan ini mendapatkan dukungan penuh dari pemerintah dan ditetapkan sebagai satu-satunya lembaga yang mengurus haji di tanah air. Sejak tahun 1969, di bawah pemerintah Orde Baru, pengelolaan haji berubah sepenuhnya di bawah kendali pemerintah (Ichwan, 2008). Meskipun demikian, masyarakat diberi ruang secara terbatas untuk terlibat dalam penyelenggaraan haji melalui program ONH Plus atau non-BPIH.

Indonesia selama ini tercatat sebagai negara yang mengirimkan delegasi haji terbesar di antara semua negara di dunia. Grafik 1 menunjukkan perkembangan jumlah jamaah haji Indonesia tahun 1989-2007 (Dirjen. Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji).



Grafik 1. Perkembangan jumlah jamaah haji Indonesia tahun 1989-2007

Dari grafik di atas terlihat bahwa jumlah jamaah haji Indonesia mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, kecuali pada tahun 1999 yang

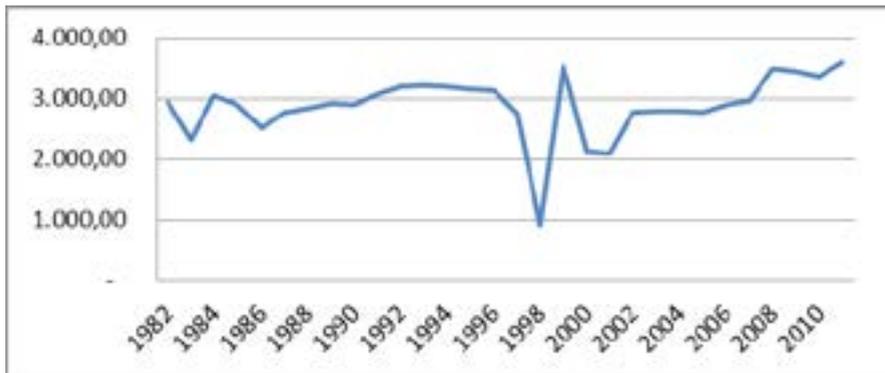
mengalami penurunan drastis menjadi hanya 70.642 orang dari 200.094 orang pada tahun sebelumnya. Hal ini diakibatkan oleh melonjaknya biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH) sebagai imbas dari krisis moneter. Namun setelah itu, jumlah jamaah haji terus merangkak naik hingga mencapai 209.083 orang pada tahun 2007. Situasi ekonomi tampak sangat berpengaruh terhadap keikutsertaan dalam ibadah haji.

Kendati faktor keagamaan dan ekonomi memegang peran penting di balik keputusan seseorang untuk naik haji, seperti didiskusikan di atas, ternyata faktor sosial dan budaya juga turut berperan mendorong seseorang untuk berangkat ke Tanah Suci (Sulthoni, Muhlisin, & Mutho'in, 2012). Bahkan lebih jauh lagi, Ichwan (2008) yang mengkaji kebijakan pemerintah dalam pengelolaan haji sampai pada kesimpulan bahwa kompleksitas dan kerumitan pengelolaan ibadah haji bukanlah karena faktor keagamaannya, melainkan lebih kental karena faktor ekonomis dan politisnya.

2.3 Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH)

Biaya untuk melaksanakan haji di Indonesia dikenal dengan nama Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH). Sebelum dikeluarkannya UU No.17/1999 tentang Penyelenggaraan Haji, biaya ini disebut dengan Ongkos Naik Haji (ONH). Penetapan BPIH dilakukan oleh Presiden atas usul Menteri Agama setelah mendapat persetujuan DPR RI. Dengan kata lain, penyusunan BPIH dilakukan secara konsultatif antara Pemerintah dengan DPR RI. Selanjutnya, besaran BPIH yang sudah disepakati dituangkan dalam Keputusan Presiden (Keppres).

Besaran BPIH bervariasi setiap tahunnya sesuai dengan fluktuasi nilai tukar valuta asing dan kondisi perekonomian. Berikut disajikan grafik 2 tentang perkembangan BPIH dalam kurun waktu 30 tahun terakhir (1982-2011) dalam satuan US dollar (Keppres tentang ONH/BPIH tahun 1982-2011).



Grafik 2. Perkembangan BPIH tahun 1982-2011 (US dollar)

Pengalaman selama 30 tahun ini menunjukkan bahwa BPIH mengalami fluktuasi tergantung kondisi perekonomian. Pada tahun krisis 1998, BPIH turun tajam dari US\$ 2.756 pada tahun sebelumnya menjadi hanya US\$ 916. Namun setahun kemudian pada tahun 1999, BPIH meroket ke angka US\$ 3.538. Hal ini menyebabkan banyak calon jamaah haji yang terpaksa mengurungkan niatnya berhaji sehingga jumlah jamaah haji Indonesia pada tahun 1999 turun drastis hingga hampir sepertiganya.

Fenomena menarik terjadi pada tahun 2000, ketika biaya penyelenggaraan ibadah haji diturunkan secara amat signifikan (dari Rp 27.373.000 atau US\$ 3.538 pada tahun 1999 menjadi Rp 17.758.000 atau US\$ 2.138 pada tahun 2000), sebagai imbas dari kebijakan Pemerintah (Keppres No. 119/1998) yang mengikutsertakan perusahaan penerbangan Saudi Arabia Airlines (SV), bersama dengan PT Garuda Indonesia yang sebelumnya memonopoli, untuk mengangkut jamaah haji Indonesia ke Arab Saudi. Dengan kebijakan tersebut, biaya angkutan penerbangan dapat ditekan dari US\$ 1.750,- menjadi US\$ 1.200,-. Selain itu, penurunan tarif ini juga disebabkan oleh penghapusan royalti kepada perusahaan penerbangan Arab Saudi yang besarnya US\$ 100 per jamaah haji sebagai efek dari pelibatan perusahaan tersebut. Monopoli penerbangan haji yang dikuasai PT Garuda Indonesia selama ini terbukti telah menyebabkan haji biaya tinggi atau menciptakan inefisiensi dalam penyelenggaraan ibadah haji (KPPU, 2008).

Komponen-komponen yang menjadi tolok ukur BPIH, antara lain dalam bentuk US\$ untuk biaya penerbangan Indonesia-Arab Saudi

(pulang pergi/PP) dan biaya operasional di Arab Saudi. Sedangkan biaya tambahan dalam bentuk rupiah adalah untuk operasional dalam negeri. Secara ringkas masing-masing komponen perhitungan BPIH dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Biaya penerbangan adalah biaya yang harus dibayar oleh pemerintah kepada pihak penerbangan yang mengangkut jamaah haji yang dilakukan secara charter. Biaya angkutan udara merupakan komponen terbesar dalam susunan BPIH yaitu antara 40-48%.
- b. Biaya Operasional di Arab Saudi merupakan biaya yang dipergunakan untuk penyelenggaraan operasional di Arab Saudi dan biaya yang harus dibayarkan oleh Pemerintah Indonesia kepada penyedia pelayanan haji di Arab Saudi.
- c. Biaya operasional dalam negeri merupakan biaya yang dipergunakan untuk penyelenggaraan operasional haji di Indonesia yang terdiri dari biaya operasional Pusat, biaya operasional di embarkasi, biaya operasional di daerah, airport tax dan biaya jasa administrasi bank (KPPU, 2008).

Di samping membayar besarnya BPIH yang telah ditetapkan, jamaah haji masih harus menanggung biaya lain yang tidak termasuk dalam komponen BPIH, yaitu biaya pemeriksaan kesehatan, perjalanan dari daerah asal ke asrama embarkasi dan sebaliknya, biaya ziarah di Arab Saudi dan biaya dam (kewajiban menyembelih hewan ternak sebagai kompensasi atas ditinggalkannya sebagian kewajiban haji).

Berikut data keuangan penyelenggaraan ibadah haji tahun 2005-2010 (ICW, 2011).

Tabel 1. Laporan Keuangan Penyelenggaraan Ibadah Haji 2005-2010 (dalam US\$)

Tahun	Beban Penerbangan	Living Cost	B. Operasional di Arab Saudi	B. Operasional Domestik	Jumlah Beban
2005	254.434.124	75.834.796	182.893.919	11.082.021	524.246.865
2006	256.692.663	75.638.377	206.213.120	8.553.178	547.099.344
2007	281.299.347	78.187.773	220.026.673	21.892.444	601.408.244
2008	358.827.403	76.651.144	226.464.781	30.000.553	691.945.889
2009	343.735.867	77.259.674	272.903.174	29.554.436	723.455.160
2010	333.680.000	78.570.000	285.267.300	61.478.600	758.997.910

Dari tabel 1, secara rata-rata selama 6 tahun, komponen BPIH secara berurutan dari yang terbesar adalah: (1) beban penerbangan berkontribusi sebesar 47,53%; (2) beban operasional di Arab Saudi sebesar 36,23%; (3) living cost sebesar 12,01%; dan (4) beban operasional domestik (di tanah air) sebesar 4,26%.

2.4 BPIH dan Harga Minyak

Mengingat beban/biaya penerbangan merupakan komponen terbesar dari BPIH (47,53%), maka perubahan pada komponen ini dapat dipastikan mempengaruhi besaran BPIH. Kenaikan atau penurunan harga minyak secara otomatis menyebabkan BPIH naik atau turun. Kementerian Agama dan DPR selaku regulator tampaknya sangat menyadari hubungan kausalitas di antara harga bahan bakar dan BPIH ini. Oleh karena itu, tatkala harga minyak turun, maka kedua lembaga ini sepakat menurunkan besaran BPIH (Muttaqin, 6 Maret 2015; Sasongko, 27 Januari 2015). Namun sebaliknya, ketika harga minyak naik, maka operator penerbangan pasti akan menaikkan biaya penerbangan sehingga mendorong kenaikan BPIH (Elisabeth, 12 Juli 2011; Kamil, 4 April 2012).

3. Data dan Metode

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif yang difokuskan untuk mengidentifikasi variabel-variabel yang mempengaruhi pergerakan biaya haji di Indonesia. Periode penelitian ini adalah 30 tahun, yaitu tahun 1982-2011. Data yang dipergunakan adalah data *time series* berupa: (1) data BPIH yang tertuang dalam Keputusan Presiden (Keppres) yang dikeluarkan setiap

tahun, yaitu tahun 1982-2011; (2) data harga minyak dunia (*oil price/OP*) yang diambil dari Illinois Oil and Gas Association (IOGA, 2011), dan kurs nilai tukar (*exchange rate/ER*) yang didapatkan dari International Financial Statistic (IFS). Unit satuan mata uang yang digunakan dalam penelitian ini adalah US dollar.

Perhitungan dan penetapan besaran BPIH (sebelumnya disebut ONH) dalam rentang waktu 30 tahun ini menunjukkan perbedaan. Sejak tahun 1982-2000, besaran ONH/BPIH ditetapkan secara seragam untuk seluruh Indonesia berdasarkan denominasi rupiah. Pada tahun 2001, dibuat 3 paket biaya yang berbeda berdasarkan zona (Paket A, B dan C) dan ditetapkan dalam denominasi rupiah. Nilai ONH/BPIH pada tahun-tahun tersebut selanjutnya dikonversi ke mata uang dollar dengan menggunakan kurs rata-rata yang berlaku pada tahun-tahun tersebut. Adapun mulai tahun 2002 dan seterusnya, BPIH ditetapkan dalam denominasi dollar Amerika (US\$). Sejak tahun 2002 itu pula, pemerintah menetapkan 8 embarkasi haji, kemudian menjadi 9 embarkasi pada tahun 2004, dan akhirnya menjadi 11 embarkasi pada tahun 2006 hingga saat ini. Mengingat BPIH untuk setiap embarkasi ditetapkan secara berbeda, maka data BPIH yang dipergunakan dalam penelitian ini mengacu kepada BPIH untuk embarkasi Jakarta. Embarkasi Jakarta dipilih dengan pertimbangan wilayahnya yang berada relatif di tengah-tengah di antara semua embarkasi yang ada, posisi Jakarta sebagai ibukota negara RI, dan embarkasi dengan jumlah jamaah haji (kloter) terbanyak. Sementara itu, data tentang harga minyak (OP) dan kurs mata uang (ER) ditetapkan berdasarkan data rata-rata tahunan.

Metode analisis yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah Vector Autoregressive (VAR). Pendekatan yang dikembangkan pertama kali oleh Sims (1980) ini merupakan sebuah sistem persamaan yang menampilkan setiap variabel sebagai fungsi linear dari konstanta dan nilai *lag* (lampau) dari variabel itu sendiri dan nilai *lag* dari variabel lain yang ada dalam sistem. Dalam model VAR, tidak ada pemisahan antara variabel eksogen dan variabel endogen. Semua variabel yang dianalisis diasumsikan berpotensi menjadi variabel endogen (Ajija, 2011). Spesifikasi model VAR meliputi penentuan variabel-variabel yang sesuai dengan teori ekonomi yang relevan dan sesuai dengan pemilihan *lag* yang dipergunakan di dalam model. Dalam pemilihan interval yang optimal, penelitian ini menggunakan Akaike Information

Criterion (AIC).

4. Hasil Penelitian dan Pembahasan

4.1 Unit Root Test

Sebelum menganalisis data menggunakan VAR, terlebih dahulu dilakukan uji stasioneritas data yang disebut *stationary stochastic process* atau uji unit root test. Uji stasioneritas ini dilakukan dengan menggunakan Augmented Dickey-Fuller (ADF) pada derajat yang sama (*level* atau *different*) hingga diperoleh data yang stasioner, yaitu data yang variansnya tidak terlalu besar dan mempunyai kecenderungan untuk mendekati nilai rata-ratanya (Ajija, 2011). Berdasarkan tabel 2 di bawah, terlihat bahwa semua data yang diuji telah stasioner di tingkat *first difference* pada $\alpha = 1\%$ atau I(1).

Tabel 2. Unit Root Test Results: Augmented Dickey-Fuller

Variabel	Level	First difference
BPIH	-4.814852	-7.273337
OP	-1.698019	-5.602581
ER	-2.322974	-6.372783

4.2 Penentuan Lag Optimal

Salah satu masalah dalam sistem VAR dengan data *time series* adalah autokorelasi. Untuk mengatasi masalah tersebut, maka perlu ditentukan optimal *lag length* dengan menggunakan uji *lag optimal*. Tabel 3 menunjukkan bahwa *lag optimal* yang direkomendasikan adalah *lag 1*.

Tabel 3. Penentuan Lag Optimal

Lag	LogL	LR	FPE	AIC	SC	HQ
0	-620.6794	NA	9.61E+14	43.01237	43.15382	43.05667
1	-559.5612	105.3762*	2.65E+13*	39.41801*	39.98379*	39.59521*

* indicates *lag* order selected by the criterion

4.3 Uji Kausalitas Granger

Uji kausalitas Granger dimaksudkan untuk menganalisis hubungan kausalitas antarvariabel yang diamati. Dalam penelitian ini, uji kausalitas digunakan untuk melihat arah hubungan di antara variabel BPIH, harga minyak dan kurs nilai tukar.

Tabel 4. Uji Kausalitas Granger

Lags 1

Null Hypothesis:	Obs	F-Statistic	Probability
ER does not Granger Cause BPIH	29	1.17256	0.28882
BPIH does not Granger Cause ER		0.19053	0.66608
OP does not Granger Cause BPIH	29	3.90202	0.05893
BPIH does not Granger Cause OP		0.00204	0.96431

Berdasarkan hasil pengujian, harga minyak (OP) berpengaruh positif terhadap besaran BPIH (probabilitas= 0,05893). Jika harga minyak mengalami pergerakan, BPIH turut mengalami penyesuaian, yakni terkoreksi meningkat, demikian pula sebaliknya. Hal ini mudah dipahami mengingat biaya transportasi udara merupakan komponen terbesar dari keseluruhan BPIH.

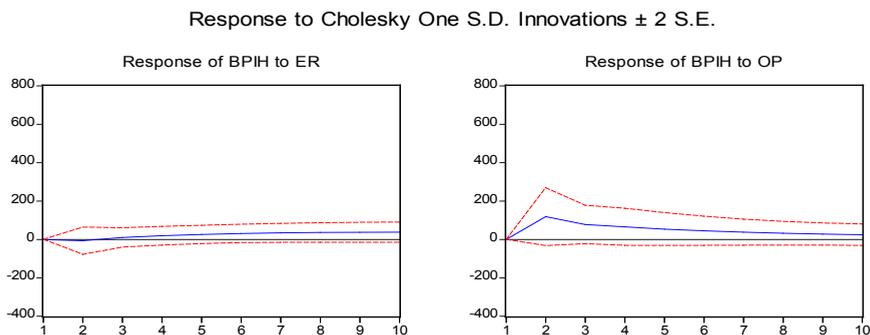
Sementara itu, nilai tukar rupiah ternyata tidak berpengaruh terhadap BPIH. Hasil ini tampak bertentangan dengan pandangan umum yang menyatakan bahwa nilai tukar rupiah berpengaruh terhadap kebijakan penentuan tarif BPIH mengingat komponen terbesar dari BPIH justru untuk kebutuhan di luar negeri, yaitu transportasi, pemondokan (hotel), konsumsi, dan uang saku jamaah selama di Arab Saudi. Hal ini mengindikasikan bahwa penentuan biaya haji tidak mengikut perubahan nilai tukar dikarenakan besaran nilai tukar tidak berdasarkan nilai *spot rate*, namun menggunakan *forward rate*. Penggunaan *forward rate* didasarkan pada kenyataan bahwa pemenuhan biaya haji sudah memenuhi kouta untuk masa yang panjang. Selain itu, dalam menentukan biaya haji pemerintah nampaknya memasukkan komponen risiko nilai tukar sehingga kemungkinan perubahan nilai tukar sudah diantisipasi.

Di samping itu, tidak adanya hubungan kausalitas antara nilai tukar dan BPIH dalam konteks ini mungkin juga disebabkan oleh beberapa hal berikut, yaitu: (1) Penetapan BPIH dilakukan oleh pemerintah sehingga bersifat final dan tidak mengalami perubahan lagi, sementara nilai tukar berfluktuasi secara dinamis dari waktu ke waktu, bahkan dapat berubah dalam hitungan menit. (2) Data nilai tukar yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data rata-rata tahunan sehingga diakui berpotensi mengalami bias. Ketika BPIH untuk suatu tahun haji sudah ditetapkan, maka perubahan atau gejolak

apapun yang terjadi setelahnya, sepanjang bukan suatu keadaan yang luar biasa, tidak akan memberikan pengaruh terhadap BPIH.

4.4 Impulse Response Function

Sims (1992), sebagaimana dikutip oleh Ajija (2011), menjelaskan bahwa fungsi *impulse response function* (IRF) menggambarkan ekspektasi k-periode ke depan dari kesalahan prediksi suatu variabel akibat perubahan pada variabel yang lain. Dengan demikian, lamanya pengaruh dari shock suatu variabel terhadap variabel lain sampai pengaruhnya hilang atau kembali ke titik keseimbangan dapat diketahui



Grafik 3. Impulse Response Function

Dari grafik 3 diketahui bahwa nilai tukar (ER), sebagaimana disebutkan sebelumnya, tidak mempengaruhi BPIH. BPIH ternyata merespon secara mendatar dan konstan pada jangka panjang, walaupun pada tahun ke-2 tercatat ada kenaikan. Sementara itu, terkait dengan harga minyak, BPIH merespon secara positif terhadap perubahan harga minyak hingga tahun ke-3 dan cenderung menurun hingga tahun ke-10. Sebagaimana dijelaskan oleh Granger Causality Test, perubahan harga minyak berpengaruh terhadap pergerakan BPIH walaupun dalam jangka panjang tekanan harga minyak menunjukkan penurunan terhadap BPIH.

Hasil ini sesuai dengan kenyataan bahwa BPIH ditetapkan oleh pemerintah jauh-jauh hari sebelum ibadah haji dilaksanakan (secara *forward*), setidaknya hingga tahun akhir penelitian ini, yaitu tahun 2011. Penetapannya besar kemungkinan dilakukan berdasarkan prediksi nilai masa depan sehingga sudah memperhitungkan potensi pergerakan harga minyak

dan nilai tukar di masa yang akan datang.

4.5 Variance Decomposition Function

Variance decomposition yang disebut juga *forecast error variance decomposition* merupakan perangkat pada model VAR yang memisahkan variasi dari sejumlah variabel yang diestimasi menjadi komponen-komponen *shock* atau menjadi variabel *innovation*, dengan asumsi bahwa variabel-variabel *innovation* tersebut tidak saling berkorelasi.

Tabel 5. *Variance Decomposition Function*

Periode	S.E.	BPIH	ER	OP
1	523.6956	100.0000	0.000000	0.000000
2	537.0341	95.11019	0.015936	4.873869
3	543.9995	93.16587	0.050227	6.783904
4	548.3254	91.70901	0.171731	8.119256
5	551.6603	90.63424	0.393919	8.971839
26	605.6303	83.62043	6.498653	9.880916
27	606.8615	83.52075	6.620257	9.858994
28	607.9998	83.42926	6.732001	9.838742
29	609.0521	83.34523	6.834718	9.820047
30	610.0248	83.26803	6.929171	9.802799

Berdasarkan tabel 5 di atas, hasil *variance decomposition* menunjukkan bahwa kedua variabel yang digunakan sebagai indikator dalam studi ini memberikan kontribusi masing-masing sebesar 6,9% dan 9,8% untuk variabel nilai tukar (ER) dan harga minyak (OP) pada periode ke-30. Hal ini mengindikasikan bahwa BPIH tidak hanya dipengaruhi oleh kedua variabel ini saja, namun masih ada variabel-variabel lain yang turut mempengaruhi pergerakan atau perubahan BPIH di Indonesia. Dengan demikian, studi ini setidaknya menunjukkan secara empirik bahwa penetapan BPIH di Indonesia perlu mempertimbangkan pula kondisi instabilitas makroekonomi dan berbagai faktor lainnya.

5. Penutup

5. 1. Kesimpulan

Penelitian ini menjelaskan hubungan antara variabel harga minyak dan kurs nilai tukar terhadap penetapan BPIH. Setelah melakukan serangkain

pengujian empirik menggunakan pendekatan *Vector Autoregressive* (VAR), menghasilkan temuan sebagai berikut:

1. Pergerakan nilai BPIH di Indonesia dari tahun ke tahun bersifat dinamis karena dipengaruhi banyak faktor. Namun mengingat besaran BPIH ditetapkan jauh sebelum pelaksanaan ibadah haji dan bersifat final, maka perkembangan yang terkait perubahan nilai tukar dan harga minyak, setidaknya hingga tahun 2011, setelah penetapannya tidak terlalu memberikan pengaruh terhadap BPIH.
2. Uji kausalitas Granger menunjukkan terdapat indikasi hubungan satu arah antara harga minyak dan BPIH.
3. Uji impulse response dan variance decomposition mengindikasikan bahwa BPIH merespon dalam nilai yang kecil terhadap pergerakan variabel nilai tukar dan harga minyak. Selain itu, kedua variabel berkontribusi dengan persentase yang relatif kecil terhadap perubahan variabel BPIH.

5.2. Saran

Penelitian tentang aspek ekonomi dalam ibadah haji sejauh ini masih sangat terbatas sehingga perlu terus dikembangkan di masa-masa yang akan datang. Identifikasi variabel-variabel yang mempengaruhi biaya haji pun perlu diperluas, misalnya dengan memasukkan tingkat inflasi, stabilitas makroekonomi, manajemen dana haji, fasilitas penyelenggaraan haji, dan lain-lain. Penelitian serupa dengan periode waktu yang lebih *up to date*, khususnya dengan memperhatikan kebijakan pemerintah yang lebih baik di 5 tahun terakhir ini, diharapkan juga dapat dilakukan dan boleh jadi hal ini akan menghasilkan kesimpulan penelitian yang berbeda. Di samping itu, untuk memperoleh hasil analisis yang lebih akurat tentang hubungan antarvariabel dalam ibadah haji ini, maka ketersediaan data yang relevan, aktual dan lebih spesifik tentunya sangat diperlukan.

Daftar Pustaka

Abdurrahman, M. (2000). *On Hajj Tourism: In Search of Piety and Identity in the New Order Indonesia*. PhD, University of Illinois at Urbana-Champaign, Urbana. Illinois.

- Ajija, S. R. (2011). *Cara Cerdas Menguasai EViews*. Jakarta: Salemba Empat.
- Din, A. K. H. (1982). Economic Implications of Moslem Pilgrimage from Malaysia. *Contemporary Southeast Asia*, 4(1), 58-75.
- Elisabeth, B. (12 Juli 2011). Garuda Minta Ongkos Angkutan Haji Naik 10%, <http://bandung.bisnis.com/read/20110712/3/66048/garuda-minta-ongkos-angkutan-haji-naik-10>.
- Ichwan, M. N. (2008). Governing Hajj: Politics of Islamic Pilgrimage Services in Indonesia Prior to Reformasi Era. *Al-Jami'ah*, 46(1), 125-151.
- ICW. (2011). Menyelamatkan Haji dan Investasi Pemberantasan Korupsi. Indonesia Corruption Watch, 1 April.
- IOGA. (2011). Illinois Oil and Gas Association. http://www.ioga.com/Special/crudeoil_Hist.htm
- Kamil, I. (4 April 2012). Kenaikan ONH Diperkirakan Rp 4 Juta, *Hidayatullah.com*. <http://www.hidayatullah.com/berita/nasional/read/2012/04/04/58099/kenaikan-onh-diperkirakan-rp-4-juta.html>.
- KPPU. (2008). Laporan Akhir Evaluasi Kebijakan Pemerintah terkait dengan Persaingan Usaha dalam Rancangan Perubahan Undang-Undang No. 17/1999 tentang Penyelenggaraan Haji. Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia.
- Miller, M. B. (2006). Pilgrims' Progress: The Business of the Hajj. *Past and Present*, 191, 189-228.
- Muttaqin, A. Z. (6 Maret 2015). Merosotnya harga minyak dunia, Menag: ONH kemungkinan turun, *Ar-Rahmah.com*.
- Pearson, M. N. (1996). *Pilgrimage to Mecca: The Indian Experience 1500-1800*. Princeton Markus Winner Publishers.
- Sasongko, A. (27 Januari 2015). DPR: Harga Minyak Turun, Logikanya BPIH 2015 Turun, *Republika*.
- Sulthoni, M., Muhlisin, & Mutho'in. (2012). Haji dan Kegairahan Ekonomi: Menguak Makna Ibadah Haji bagi Pedagang Muslim di Yogyakarta. *Jurnal Penelitian*, 9(1), 49-65.